



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

LAPORAN TAHUNAN

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (PRJPD, RPJMD dan RKPD)

***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
2024***

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Desember 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 198101192006042003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Hasil Kegiatan	3
1.5 Lingkup Kegiatan.....	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II Laporan Pelaksanaan Kegiatan	5
2.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	5
2.2 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumbar Tahun 2025-2045.....	64
2.3 Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahun 2024 dan Identifikasi Kegiatan Strategis/Beresiko Tahun 2024	82
2.4 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	85
2.5 Penyampaian Usulan Daerah Untuk Pendanaan dari APBN	89
BAB III Permasalahan	98
BAB IV Penutup	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan daerah.

Guna mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan di sektor infrastruktur maka dilaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis, kebutuhan infrastruktur dan pendanaan sesuai kewenangan pemerintah Daerah, serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur antar OPD serta dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera. Oleh karena itu, alokasi anggaran difokuskan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD dan target Program Unggulan Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
- 9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, tambahan lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 11) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 13) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-420-2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor: 903-957-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negera Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 14) Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 020/05/I/Set/Bappeda-2024 tanggal Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 15) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Provinsi

Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Mendukung ketersediaan data, informasi dan kebijakan untuk menunjang perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur;
3. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4. Hasil Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur sesuai dengan tahapan dan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur;
3. Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur antar Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi lingkup bidang infrastruktur.
2. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur.
3. Melaksanakan koordinasi lingkup bidang infrastruktur dengan OPD dan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Infrastruktur.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan.
- BAB II** **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan sub kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat.
- BAB III** **Permasalahan**, menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
- BAB IV** **Penutup**, penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Barat dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur, maka telah dilaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian/Lembaga, OPD Teknis terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan/difasilitasi antara lain:

2.1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelerasan dengan Prioritas Nasional, dengan titik berat pada penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan mengacu sepenuhnya untuk menjawab tuntutan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain hal tersebut, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Namun demikian, menyikapi perkembangan proses penyusunan perencanaan di

tingkat nasional yang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 juga sedang dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maka tentunya RKPD Tahun 2025 juga akan diwarnai dengan beberapa isu dan kebijakan baru di daerah sebagai bentuk keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 yakni :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025 difokuskan pada:

8. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
10. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
11. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
13. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
14. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
16. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup
17. Percepatan capaian sanitasi layak

18. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
19. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
20. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
21. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk mendukung koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi seperti Forum Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastwil melaksanakan forum dengan mengundang Bappeda Provinsi, SKPD terkait lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Forum Perangkat Daerah menjadi masukan bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja, dan nanti menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Adapun Perangkat Daerah di Lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang melakukan kegiatan Forum Perangkat Daerah adalah Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan BPBD.



Selain kegiatan Forum Perangkat Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan juga melakukan verifikasi terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD yang akan di tampung dalam RAPBD TA 2025. Dari seluruh usulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPD, telah dilakukan verifikasi dengan hasil sebagai berikut:

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA
99	28-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	normalisasi batang pakau	lubuk sikaping, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
100	28-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	normalisasi batang lundar	panti, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
107	28-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	normalisasi batang sumpur sungai galogah tambangan	panti selatan kecamatan panti, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

117	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	normalisasi batang air tandahan sungai pandahan	sungai pandahan lubuk sikaping, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
123	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang Sibinail Kubu-Curanting	Jorong V Curanting Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
124	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang Asik Tanjung Beriang	Tanjung Beriang Jorong li Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
125	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan bronjong batang air lundar	Jorong Lundar Nagari Panti Timur, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

126	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Bronjong batang air Lambak	Jorong Lambak Nagari Panti Timur kecamatan Panti, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
127	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi batang air tingkarang	Jorong III Rambah Nagari Lansek kadok kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
129	29-02-2024	SUHARJONO	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan bronjong kepala bandar sawah liek lubuak layang	Jorong II Lubuak Layang Nagari Lubuak layang Kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

133	29-02-2024	SUHARJONO	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Pembukaan Jalan Usaha tani batu ampar - Pergambiran Nagari Lansek kadok	Nagari Lansek kadok Barat kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
134	29-02-2024	SUHARJONO	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Pengecoran Jalan usaha tani Abam	Jorong IX Abam nagari lubuak layang kecamatan rao selatan , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
135	29-02-2024	SUHARJONO	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Pembukaan Jalan usaha Tani kelompok Tani Fajar Baru	Jorong IV Kubu Nagari lubuak layang kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

140	01-03-2024	AIDA	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	(Ruas Jalan Provinsi) Drainase Jalan Kampung Panjang Jorong Bintungan Sakti Nagari Durian Tinggi	Jorong Bintungan Sakti Nagari Durian Tinggi, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
151	06-03-2024	ISMET AMZIS	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jalur Irigasi Permungkiman	Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Dibatalkan	-	-
155	06-03-2024	ISMET AMZIS	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi jaringan irigasi	KAB AGAM, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
163	13-03-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Bronjong Bantaran Batang Sinamar	Nagari Koto Tuo Kec. Harau, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

166	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	lanjutan betonisasi irigasi sekunder	Kabu-kabu s.d Padang Mudiek RT. 01 RW III Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
167	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Lanjutan Betonisasi saluran irigasi tersier	Sepanjang saluran Irigasi Bandar Lubuak Botuang s.d Batang Sikali RT. 02 RW.III Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

169	14-03-2024	SUPARDI	Penyusunan dokumen DED dan AMDAL pada TPA Regional Payakumbuh untuk mendukung bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon (Progul)	Lanjutan Regid Pavement Jalan Menuju TPA Regional	Ruas Jalan Balai Pajang - SP. Padang Karambia - Tj.Bungo TPA Regional , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
170	14-03-2024	SUPARDI	Penyusunan dokumen DED dan AMDAL pada TPA Regional Payakumbuh untuk mendukung bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon (Progul)	Pemeliharaan Berkala Jl.Singa Harau dan Jl.hatib Sulaiman	Ruas Jalan Balai Panjang - Sp. Padang Karambia - Tj. Bungo TPA Regional , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

171	14-03-2024	SUPARDI	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Tembok Penahan Bahu Jalan Lingkar Selatan	Simp. Tanjung Anau - Simp. Payo Banda - Bts. Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
172	14-03-2024	SUPARDI	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pemeliharaan Berkala Jl. Lingkar Selatan	Simp. Tanjung Anau - Simp. Payo Banda - Bts. Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
176	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Dareh	Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

177	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Agam	Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
178	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Batang Lampasi	Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
179	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Batang Talawi	Kab.Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
180	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Batang Tabik	Kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

181	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Perkuatan Tebing Sungai Batang Agam	Kelurahan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
182	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Bronjong Sungai Sikali	Padang Karambia , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
183	14-03-2024	SUPARDI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Sungai Batang Pulau	Kelurahan Parik Muko Aia, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan, tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

208	18-03-2024	NURFIRMANWA NSYAH	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Jalan Usaha Tani 5 paket	Dapil 7 Sumbar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
210	18-03-2024	NURFIRMANWA NSYAH	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Jalan Lingkungan, Perkim 5 paket	Dapil 7 Sumbar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
215	18-03-2024	NURFIRMANWA NSYAH	Dukungan pembiayaan terhadap pembangunan Gedung Kebudayaan (Progul)	Pemugaran Benda Cagar Budaya, Rumah Gadang di Nagari Paninggahan. Kab. Solok	Pemugaran Benda Cagar Budaya, Rumah Gadang di Nagari Paninggahan. Kab. Solok	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
250	19-03-2024	RAHMAT SALEH	masih terbatasnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Bantuan air bersih(pamsi mas),jorong balai pandan nagari cupak kecamatan gunung talang	Bantuan air bersih(pamsi mas),jorong balai pandan nagari cupak	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

			Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	kabupaten solok	kecamatan gunung talang kabupaten solok					
251	19-03-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Landu Nagari Ladang Panjang Barat Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman	Nagari Ladang Panjang Barat Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
252	19-03-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Lampah Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman	Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
254	19-03-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Timah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman	Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
257	19-03-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi	Normalisasi Sungai Batang Timah Kec. Tigo Nagari	Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman, Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

			(RPJMD)	Kab. Pasaman	Sumatera Barat					
265	19-03-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	PENGAMANA N TEBING BATANG LANDIR NAGARI LADANG PANJANG BARAT KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN	BATANG LANDIR NAGARI LADANG PANJANG BARAT KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
326	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Kebutuhan untuk jalan usaha tani	JUT Kelanti Putusan, Jr IX Pancahan, Nagari Tarung Tarung Selatan, Kec Rao	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
344	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pembangunan Jalan Provinsi (Rabat Beton Bahu Jalan dan Drainase) Ruas Jalan Panti-Simpang ampek (Titik Andilan, Nagari Simpang	Ruas Jalan Panti-Simpang ampek (Titik Andilan, Nagari Simpang Tonang Selatan), Kec Dua Koto, Kab	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

				Tonang Selatan)	Pasaman, Provinsi Sumatera Barat					
345	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pembangunan Jalan Provinsi (Rabat Beton Bahu Jalan dan Drainase) Ruas Jalan Panti-Simpang ampek (Titik Silang Empat, Nagari Cubadak Barat)	Ruas Jalan Panti-Simpang ampek (Titik Nagari Simpang Tonang Selatan), Kec Dua Koto, Kab Pasaman	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
346	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pembangunan Jalan Provinsi (Rabat Beton Bahu Jalan dan Drainase) Ruas Jalan Rao-Rumbai, Mapattunggul	Ruas Jalan Rao-Rumbai, (titik Bukittujuh-Pintu Padang, Nagari Pintu Padang) Kec Mapattunggul, Kabupaten Pasaman	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

375	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Pembangunan Jalan Lingkung	Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
376	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Perbaikan Sungai Batang Air	Jorong Subang-Subang Nagari Tiku Limo Jorong, Kec. Tanjung Mutiara	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
377	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Revitalisasi Lubuk Siarang	Lubuk Siarang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
378	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pipanisasi Hidro Pam Aia Taganang	Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
379	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Repitalisasi Kapalo Banda Sangkir	Kapalo Banda Sangkir, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

409	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Pengerukan Anak Sungai Duit (Anak Sungai Batang Tingkarang)	Simpang Tigo Tobek Luar Muaro Tolang, Jorong Air Hangat, Nagari Tanjung Betung	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
410	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Pengerukan Batang Sumpur,	Titik Nagari Panti, Nagari Panti Utara, Kec Panti, Kab Pasaman	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
434	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Sarana Toilet yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Pengadaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Kelengkapan Jalan (Pengadaan Tiang Dan Lampu Jalan) Solar Cel	Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

435	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Sarana Cuci tangan yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Festival Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
460	21-03-2024	MARIO SYAHJOHAN	Penyusunan Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak (Progul)	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas (Solok Selatan)	SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

471	21-03-2024	MARIO SYAHJOHAN	Pembangunan dan pengelolaan pusat inkubasi ekonomi kreatif (Sumbar Kreatif Hub) (Progul)	bimtek dan study tiru untuk ekonomi kreatif	solok selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Pariwisata	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
564	26-03-2024	ALI TANJUNG	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Meninggalkan usaha dan percepatan ekonomi rakyat	Duku utara, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
569	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Sungai Batang Siduampan Nagri Batahan Selatan Kec Ranah Batahan Pasbar	Sungai Batang Siduampan Nagri Batahan Selatan Kec Ranah Batahan Pasbar	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
577	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Batang Air Balam Koto Tuo, Koto Balingkan Pasbar	Air Balam Koto Tuo, Koto Balingkan Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

584	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Batang Robi Jonggor Gunung tuleh Pasbar	Jonggor Gunung tuleh Pasbar , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
602	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	bronjong Batang Laping Desa Baru Ranah Batahan Pasbar	Desa Baru Ranah Batahan Pasbar	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
604	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Penahan Tebing Aek Tombang Padang Koto Balingka Pasbar	Aek Tombang Padang Koto Balingka Pasbar	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
606	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Batang Silawai Air Bangis Pasbar	Silawai Air Bangis Pasbar	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
608	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Bronjong Lubuak Landuo Air Kuning Pasbar	Lubuak Landuo Air Kuning Pasbar	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

612	26-03-2024	ALI TANJUNG	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Untuk peningkatan ekonomi kerakyatan	Rajo Agam barung barung belantai , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
617	26-03-2024	ALI TANJUNG	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Peningkatan ekonomi kerakyatan	Kampung baru kosong nan ampek, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
624	26-03-2024	ALI TANJUNG	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Peningkatan ekonomi kerakyatan	Bayang utara , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

626	26-03-2024	ALI TANJUNG	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Peningkatan ekonomi kerakyatan	Bayang utara, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
662	26-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Penyusunan Rencana Teknis Konstruksi Pengendali Banjir Batang Sumpur Kabupaten Pasaman	Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
664	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Salido Nagari Salido Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan	Nagari Salido Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
665	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Painan Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

666	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengamanan Tebing Batang Lumpo Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kecamatan Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
739	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Bandar Halim (Muara Paneh - Kinari) Kab. Solok	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
740	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Pamujan Selayo Kota Solok	Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
741	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Banda Panjang (Selayo) Kab. Solok	Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
745	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Banda Paneh Gadang Cupak Kab. Solok	Cupak Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
750	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Batang Lembang Koto Baru - Kota Solok	Koto Baru Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

764	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Bintangan Talang Kab.Solok	Kab.Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
766	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Banda Gadang Guguak Kab.Solok	Guguak Kab.Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
769	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Muara Danau Alahan Panjang Kab. Solok	Alahan Panjang Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
771	27-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I Rehab Sapan Kayu Manang Surian Kab. Solok	Surian Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
901	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Bronjong Lapau Manggis Rw.	Lapau Manggis Rw. , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
902	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Bronjong Tanjung Saba	Bronjong Tanjung Saba , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

903	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Penahan Dinding Tanah Belakang Smpn 41 Padang	Tanah Belakang Smpn 41 Padang	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
905	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasang Batu Bronjong Guo	Pemasang Batu Bronjong Guo	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
906	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Bronjong Lapau Munggu	Bronjong Lapau Munggu	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
907	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Bronjong Belakang Masjid Raya Belimbing	Pemasangan Batu Bronjong Belakang Masjid Raya Belimbing	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
934	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Dukungan pembiayaan terhadap pembangunan Gedung Kebudayaan (Progul)	Pembangunan Gedung Serba Guna KAN Pauh IX	KAN Pauh IX, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

936	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Sarana Air Bersih yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Pengadaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pengadaan Lampu Jalan Solar Cell	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
987	27-03-2024	BUKHARI	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pengaspalan Jalan Ruas Kubu Kerambil Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

1004	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Bantuan Bentor Untuk 10 Bank Sampah	Padang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
1125	28-03-2024	M. NURNAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Duku (Ketaping) - Pariaman	Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1126	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya sarana jalan usaha tani	nagari bukit kandung , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

1128	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya jalan usaha tani yang memadai	nagari batang barus kecamatan talang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1129	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya irigasi pertanian yang layak	nagari batang barus, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1130	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan yang layak untuk warga	nagari koto anau, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

1132	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya jalan produksi tani	nagari kampung batu dalam , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1133	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan warga	nagari kp batu dalam , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1134	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya jalan usaha tani yang memadai	nagari sungai nanam , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1135	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang	belum adanya jalan warga yang memadai	nagari sungai nanam , Provinsi Sumatera	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

			belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)		Barat					
1138	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan yang memadai	nagari dilam , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1140	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan yang layak untuk warga	nagari salayo , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1141	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	belum adanya jalan yang memadai	nagari salayo , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

			(Progul)							
1142	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	belum adanya jalan yang memadai	kecamatan pantai cermin , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1143	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan warga	nagari surian , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1144	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan	belum adanya jalan yang memadai	nagari guguk , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru

			(Progul)							
1146	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan yang memadai	nagari sibarambang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1148	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	belum adanya jalan yang memadai	nagaria dingin, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1169	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	pemasangan badan jalan yang roboh	kecamatan gunung talang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
1170	28-03-2024	IRZAL ILYAS	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan	belum adanya irigasi	nagari salayo, Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

			Provinsi (RPJMD)		Sumatera Barat					
1188	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Rau	Kec. Kinali, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1189	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bunut	Kec. Kinali,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1190	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tambau	Kec. Kinali,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1191	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Muaro Binguang	Kec Kinali, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1192	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Paku	Kec. Kinali,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1193	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tandikek	Kec Kinali,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

1194	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sariak	Kec. Luhak Nan Duo, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1195	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar	Kec. Luhak Nan Duo, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1196	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tian	Kec. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1197	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Umpai	Kec. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1198	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tinggam	Kec. Talamau, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1199	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Limpato	Kec. Talamau,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1200	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang	Kec, Talamau, Provinsi Sumatera	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

			(RPJMD)	Pariasan	Barat					
1201	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Alin	Kec. Gunung Tuleh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1202	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Saligawan	Kec Gunung Tuleh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1203	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Situak	Kec. Sungai Aur, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1204	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji	Kec. Sungai Aur,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1205	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Balam	Kec, Sungai Aur,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1206	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kapa	Kec Luhak Nan Duo,, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

				Selatan						
1207	28-03-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Surau Sutan Pamuncak Kapa Timur	Kec, Luhak Nan Duo., Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1245	29-03-2024	ARTATI	Penyediaan Sarana Air Bersih yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Bantuan Lampu Jalan Di Kabupaten Agam	Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

1249	29-03-2024	ARTATI	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Bantuan Pembangunan Jalan Pagadih, Palupuh, Kabupaten Agam	Jalan Pagadih, Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1250	29-03-2024	ARTATI	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Bantuan Pembangunan Jalan Padang Koto Gadang Palembang, Kabupaten Agam	Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1309	29-03-2024	SAWAL	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pembangunan Drainase Jalan Provinsi Jalan Padang Sawah - Kumpulan Kab. Pasaman	Jalan Padang Sawah - Kumpulan Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

1310	29-03-2024	SAWAL	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pelebaran Jalan Provinsi Jalan Padang Sawah - Kumpulan Di Kab. Pasaman	Padang Sawah - Kumpulan Di Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1327	29-03-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	D.I. Pembangunan Selasar Andam Dewi Aro Suka Kab. Solok	Andam Dewi Aro Suka Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1348	30-03-2024	FIRDAUS	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Irigasi Sawah	Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Padang Pariaman	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

1541	01-04-2024	BAKRI BAKAR	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembuatan Tanggul Abrasi Pantai Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan	Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1550	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Pembangunan Drainase Trotoar Jalan Provinsi	Pakan Sinayan, Banuhampu , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1552	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Perbaikan Gorong-Gorong Jalan Provinsi	Jorong Pauh Taruko Nagari Koto Malintang Dan Jorong Ambacang Nagari Koto Malintang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1553	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Bandar Irigasi Padang Panji Menuju Jorong Cacang	Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kec. Tanjung	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

				Tinggi	Mutiara, Provinsi Sumatera Barat					
1554	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Bandar Irigasi Padang Ampang Kandih	Nagari Durian Kapeh Darussalam. Kec. Tanjung Mutiara,	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1555	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bendungan Irigasi Sungai Lingkuang	Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kec. Tanjung Mutiara	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	-
1556	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Perbaikan Irigasi Banda Talang Di Simpang Empat	Nagari Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	-
1557	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembuatan Embung Talago	Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	-
1559	01-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang Sitanang	Nagari Sitanang, Kec. Ampek Nagari	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh Setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

1747	02-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Dukungan operasional terhadap pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Bentor Angkut Sampah	Kec. Tanjung Mutiara, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah dievaluasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
1748	02-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Air Bersih Rehab Mati Air Ulu Kancan	Jorong Saribulan Nagari Tigo Balai Kec. Matur, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah dievaluasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
1749	02-04-2024	LAZUARDI ERMAN	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana tempat pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Air Bersih Di Benteng Jorong Andaleh	Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai, Kec. Matur, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah dievaluasi oleh Setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

1752	02-04-2024	INDRA	Dukungan operasional terhadap pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Becak Motor	Se Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
1784	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Kapar Di Surau Sutan Kabasaran	Jorong Kapar Timur, Kec. Luhak Nan Duo, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1787	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar Di Jorong Kapar Selatan	Nagari Kapar, Kec. Luhak Nan Duo, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1790	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Baranjong Di Muaro Sasak	Jorong Pasar Lama Nagari Ranah Pasisie, Kec. Sasak Ranah Pasisie	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

1792	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Sungai Batang Kapar	Jorong Pondok Nagari Ranah Pasisie, Kec. Sasak Ranah Pasisie	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1795	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Anak Sungai Sialang	Jorong Padang Halaban Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1796	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pemasangan Batu Baronjong	Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkung Aur Ilia, Kec. Pasaman	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1797	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Pengamanan Tebing Anak Air Sungai Batang Lingkin	Jorong Tongar Nagari Aia Gadang Timur, Kec. Pasaman	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1800	02-04-2024	ZULKENEDI SAID	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Biluan Di Jorong Simpang	Jorong Simpang Empat, Kec. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-

				Empat						
1874	02-04-2024	INDRA	Dukungan pembiayaan terhadap pembangunan Gedung Kebudayaan (Progul)	Gedung Serba Guna	Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	-	Dibatalkan	-	-
1890	02-04-2024	HARDINALIS KOBAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi D.I. Banda Gadang Nagari Koto Gadang Guguak	Banda Gadang Koto Gadang Guguak	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1891	02-04-2024	HARDINALIS KOBAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi D.I. Bandar Halim Nagari Muara Panas	Nagari Muara Panas	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1902	02-04-2024	MUHAMMAD IKHBAL	Dukungan operasional terhadap pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Becak Motor Di Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
1911	02-04-2024	DASWIPPETRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Malandu Satu Kampung Landu Dan Banja Durian	Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Ditolak	salah input nama anggota dewan	-

				Gadang Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat						
1912	02-04-2024	SAWAL	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Malandu Satu Kampung Landu Dan Banja Durian Gadang Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
1936	02-04-2024	SAWAL	Dukungan pembiayaan untuk Operasional terminal Padang Panjang (Progul)	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Lampu Jalan Di Jalan Provinsi Padang Sawah - Kumpulan Kab. Pasaman	Jalan Provinsi Padang Sawah - Kumpulan Kab. Pasaman	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1939	02-04-2024	HENDRA IRWAN RAHIM	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi D.I Batang Selo	Batang Selo, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-
1940	02-04-2024	HENDRA IRWAN RAHIM	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi D.I Galo Gandang	galo gandang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah dievaluasi oleh Setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

1943	02-04-2024	HENDRA IRWAN RAHIM	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Batusangkar Ombilin KM 4 Jorong Pabalutan Nagari Rambatan	Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah dievaluasi oleh Setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
1986	03-04-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Sarana Air Minum yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Penyediaan Video Tron Untuk Informasi Publik Terkait Lalulintas Dan Keselamatan Lalu Lintas	Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

1987	03-04-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Sarana Air Bersih yang layak pada Terminal Tipe B (kewenangan Pemerintah Provinsi) yakni Terminal Padang Panjang, Terminal Sago Painan, Terminal Sawahunto, Terminal Payakumbuh, Terminal Batusangkar (Progul)	Penyediaan Sarana Rambu Rambu Lalu Lintas	Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2026	04-04-2024	MUHAMAD RIDWAN	Dukungan pembiayaan terhadap pembangunan Gedung Kebudayaan (Progul)	Pemugaran Benda Cagar Budaya, Rumah Gadang di Dapil II Sumabar	Pemugaran Benda Cagar Budaya, Rumah Gadang di Dapil II Sumabar	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
2037	04-04-2024	IRSYAD SYAFAR	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Perbaikan Jaringan irigasi Batang tabik	Perbaikan Jaringan irigasi Batang tabik Sungai Kamuyang	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
 2024**

2038	04-04-2024	IRSYAD SYAFAR	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang pulau	Normalisasi Batang pulau Payakumbuh	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
2063	04-04-2024	MUZLI M. NUR	Dukungan operasional terhadap pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Becak Motor Di Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	-	Dibatalkan	-	-
2064	04-04-2024	MUZLI M. NUR	Dukungan operasional terhadap pengelolaan limbah B3 di Air Dingin Kota Padang (Progul)	Pengadaan Becak Motor Di Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
2069	04-04-2024	MUZLI M. NUR	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Peningkatan Jalan Provinsi Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan , sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

2078	04-04-2024	IRSYAD SYAFAR	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Perbaikan drenase jalan provinsi sungai kamuyang	Perbaikan drenase jalan provinsi sungai kamuyang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2093	04-04-2024	AIDA	masih terbatasnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kelanjutan Pembangunan Spam Regional	Se Kec. Di Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2094	04-04-2024	AIDA	masih terbatasnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kelanjutan Pembangunan Spam Regional	Se Kecamatan Di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

2138	05-04-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang Bayang Nagari Aur Begalung Talaok Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Nagari Aur Begalung Talaok Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2140	05-04-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Normalisasi Batang Lumpo Ruas Nagari Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan, Pasar Baru Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Nagari Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan, Pasar Baru Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2150	05-04-2024	MOCHKLASIN	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	Perbaikan/Rehab jalan Provinsi di Dapil 8 Sumbar	Perbaikan/Rehab jalan Provinsi di Dapil 8 Sumbar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	SKPD menelaah kembali kewenangan, tupoksi, RC, permasalahan, sub kegiatan, urgensi usulan mendukung progul, volume satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dengan pengusul
2157	05-04-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehab Kapalo Banda Nagari Kapelgam Koto Berapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Nagari Kapelgam Koto Berapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**Tahun
2024**

2174	05-04-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengaman Tebing Nagari Kubang, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Nagari Kubang, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
2175	05-04-2024	AIDA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pengaman Tebing Nagari Kubang, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan	Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Dibatalkan	-	-
2223	05-04-2024	RAFDINAL	Pelaksanaan budidaya maggot pada nagari/desa (Progul)	Pengelolaan sampah menjadi magot	Pengelolaan sampah menjadi magot , Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	OPD utk dapat menelaah kembali kewenangan,tupoksi,RC, permasalahan sesuai kamus usulan, sub.keg, urgensi usulan mendukung progul, vol. satuan dan anggaran serta melakukan koordinasi dgn pengusul
2228	05-04-2024	RAFDINAL	Dukungan pembiayaan untuk Operasional terminal Padang Panjang (Progul)	Mobil Kantor penghubung	Mobil Kantor penghubung agam, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Verifikasi Perangkat Daerah	Sudah divalidasi oleh setwan	Usulan BKK diteruskan ke BPKAD untuk ditelaah / verifikasi kelengkapan RC sesuai dengan Pergub BKK terbaru
2272	05-04-2024	BUKHARI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan	Rehabilitasi D1 Batang Solo	Kabupaten Tanah Datar, Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

			Provinsi (RPJMD)		Sumatera Barat					
2298	05-04-2024	NELA ABDIKA ZAMRI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Pembuatan Bronjong Batang Maek	Jorong Batu Balah Nagari Gunung Malintang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
2383	05-04-2024	INDRA	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Batu Grib Pengaman Pantai Di Kota Padang	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-
2407	05-04-2024	BUKHARI	Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Provinsi (RPJMD)	Rehabilitasi D 1 Galo Gadang	Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	-	Validasi Mitra Bappeda	Sudah divalidasi oleh setwan	-

2.2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumbar Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah Pusat dan Daerah serta kolaborasi antar pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itulah disusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Dari sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan tersebut, terdapat 2 sasaran visi dan 13 indikator utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dimana masing-masing indikator tersebut nantinya akan di tetapkan target dan arah kebijakan untuk masing-masing tahapan. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga akan menurunkan target-target dan arah kebijakan tersebut kepada pemerintah Kab/Kota untuk diakomodir dalam RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045. Adapun target dan Arah Kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

KODE	RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT				
		2025	2030	2035	2040	2045
SV.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission					
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27	71,92	81,56	91,21
SV.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10

Arah Kebijakan Provinsi Pada Masing-Masing Sasaran Visi

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission				
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			yang rendah karbon			
SV.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Sumatera Barat

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
18.b	Porsi EBT dalam Bauran	Porsi EBT dalam Bauran Energi	51,70	61,27	70,83	80,40	89,96	1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi 2. Perumusan	1. Akselerasi penyesuaian harga EBT yang kompetitif dan ekonomis. 2.	1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi terbarukan serta	1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi dalam mengelola energi

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Energi Primer (%)	Primer (%)						kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan 3. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan 4. Penguatan kelembagaan dan pendanaan	Percepatan substitusi pembangkit EBT terhadap pembangkit fosil 3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.	akses untuk masyarakat terhadap energi sehingga tercipta kemudahan akses masyarakat memperoleh energi 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energy	terbarukan 2. Penggunaan gas dan bahan bakar nabati seperti Bioetanol, Biodiesel dan Bioavtur terus ditingkatkan
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	64,00	73,77	82,52	91,26	100,00	1. menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana 3. meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Meningkatkan bantuan pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing dan social housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi.	1. Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								berbasis masyarakat dengan dukungan stimulasi dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan	4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah.		
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,57	28,57	38,57	50	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	1. pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,00	30,83	50,55	70,28	90,00	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3)	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	circular economy	Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
42.c. 2	-	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00	46,66	64,44	82,22	100	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah, 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan koordinasi dan kerjasama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
											termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
43.a.1	Indeks Ketahanan Energi	Konsumsi listrik per kapita	707	1181,25	1562,50	1943,75	2325	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik. 3. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 4. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan perusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing 3. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								mampu 5. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan		
43.a.	-	Intensitas energi	160	152,50	145	137,50	130	1. Percepatan pemanfaatan kendaraan	1. Memfasilitasi pembangunan	1. Meningkatkan pengembangan	1. Membangun Pembangkit Listrik

Kod e.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
2		primer						dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih 2. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi 3. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan 4. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan dengan pendekatan energi terbarukan 5. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air 6. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik maupun media sosial 7. Mengalihkan penggunaan penggunaan Pembangkit Listrik	wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya dengan pendekatan energi terbarukan. 2. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi secara berkelanjutan 3. Konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan agar energi air tetap terjaga 4. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas	sumber daya, potensi atau cadangan energi dari energi terbarukan 2. Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, terutama di daerah belum berkembang, terisolir, terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat 3. Mengalihkan penggunaan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT 4. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan	Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk penggunaan energi hijau. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. 3. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 4. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT	bumi dan air 5. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik	penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik 5. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik maupun media sosial	aparatur terkait. 5. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik
43.c.1	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	2,82	4,55	6,29	8,02	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).;	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai); 4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawa	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.	1) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai); 3) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawa n & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
									n & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Mentawai).	air
43.c.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	41,23	55,92	70,62	85,31	100,00	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayah. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,51	164,19 - 157,87	157,86 - 151,54	151,53 - 145,21	145,20-123,49	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetaknya potensi dan resiko	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	terhadap PDB (%)							bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami	bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan di kawasan DAS dan pesisir pantai dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan	2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								dan kekeringan dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.	infrastruktur tahan bencana		
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	18,08	22,54	27,00	31,45	35,91	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	28,05	36,62	45,18	53,75	62,31	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			

Dalam rangka memastikan target dan arah kebijakan ini dapat diakomodir oleh Pemerintah Kab/Kota dalam RPJPD Kab/Kota tahun 2025-2045, Bappeda Prov. Sumatera Barat melaksanakan musrenbang RPJPD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dimana kegiatan musrenbang ini ditindaklanjuti dengan Desk bersama Pemerintah Kab/Kota. Pelaksanaan Desk Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 April 2024 di Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat yang dibagi menjadi tiga desk, yaitu Desk Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Desk Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Desk Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kegiatan Desk Musrenbang diikuti oleh Perwakilan Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Lembaga Profesi, Organisasi Masyarakat, LSM serta seluruh Pemerintah Kab/ Kota di Sumatera Barat, SKPD Provinsi teknis terkait. Pembahasan pada Desk Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat di fokuskan pada:

- ✓ Arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Prov. Sumatera Barat 2025-2045
- ✓ Arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045
- ✓ Tanggapan dan saran dari seluruh peserta desk musrenbang RPJPD terhadap arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045

Kab. Agam



Kab. Pasaman



Kab. Pasaman Barat



Kab. Solok Selatan



Kab. Dharmasraya



Kab. Kep. Mentawai



Kab. Padang Pariaman



Kab. Sijunjung



Kota Padang Panjang



Kota Pariaman



Kota Sawahlunto



Kota Solok



Kab. Lima Puluh Kota



Kab. Pesisir Selatan



Kab. Solok



Kota Padang



Kab. Tanah Datar



Kota Bukittinggi



Kota Payakumbuh



2.3. Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahun 2024 dan Identifikasi Kegiatan Strategis/Beresiko Tahun 2024

Guna mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengagendakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan OPD Provinsi Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan sebaran kegiatan OPD Provinsi di kabupaten / kota serta mengidentifikasi Kegiatan Strategis / Beresiko yang akan dilaksanakan OPD Provinsi tahun anggaran 2024.

Dalam kesempatan ini, seluruh OPD diminta untuk memaparkan rencana kerja tahun anggaran 2024 serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan strategis / beresiko yang akan di laksanakan. Selain itu OPD juga diminta untuk mempersiapkan segala bentuk antisipasi serta pengendalian terhadap resiko yang mungkin muncul terhadap pekerjaan-pekerjaan strategis tersebut.

Nantinya kegiatan-kegiatan strategis ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan kategori: Kompleksitas, Besaran Anggaran, Daya ungkit pekerjaan terhadap pencapaian outcome dan Riwayat Temuan Hasil Pemeriksaan. Adapun daftar kegiatan strategis OPD Lingkup Bidang Infraswil adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terkait Rambu-rambu Lalu Lintas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi dengan anggaran Rp. 175 Juta untuk 110 Unit dengan urgensi pekerjaan: penggantian rambu yang rusak/hilang di ruas jalan Provinsi, waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan bersifat kondisional
 - b. Penyusunan Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak di Kepulauan Mentawai dengan anggaran 600 Juta untuk 1 Dokumen dengan urgensi kegiatan: mendukung pemenuhan readnes kriteria untuk pembangunan fisik Pelabuhan Sinakak. Jika seluruh readnes kriteria lengkap (RIP, DED dan Dokumen

Lingkungan) akan masuk anggaran APBN sebesar Rp. 100M untuk pembangunan fisik

- c. Perhitungan Kinerja Jalan Provinsi (V/c Rasio) dengan anggaran 200 Juta untuk 1 Dokumen dengan urgensi: Mendukung pencapaian IKU dan IKD, V/C Rasio ini diperlukan untuk mengevaluasi seberapa jauh kualitas LOS (Level Of Service) di ruas jalan Provinsi, yaitu tingkat kepadatan atau volume penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang melayani masyarakat, yang nantinya berguna untuk pengambilan kebijakan guna mendukung layanan publik di sektor transportasi
 - d. Pengaturan Lalu Lintas libur lebaran natal dan tahun baru dengan anggaran Rp. 700 Juta untuk 1 Dokumen dengan urgensi: Pengaturan Lalu Lintas dalam rangka mengantisipasi kemacetan sebelum dan sesudah Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2. Dinas ESDM
- a. Pelaksanaan kegiatan konservasi energi (Lanjutan pembangunan PLTS Irigasi Talawi Mudiak - Sawahlunto, Pembangunan PLTS Irigasi Desa Bukik Gadang-Sawahlunto, Pembangunan PLTS Irigasi Kab 50 Kota, Pembangunan PLTS Irigasi Nagari Saruaso Kab Tanah Datar, Pembangunan PLTS Irigasi Nagari Tanjung Kab Tanah Datar dan Pembangunan PLTS Irigasi Kab Pasaman) dengan anggaran Rp. 3,1 Milyar. Urgensi dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan bauran energi di Sumatera Barat
 - b. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung) untuk 470 KK sambungan listrik untuk rumah tangga sederhana dengan anggaran Rp. 1,8 Milyar. Urgensi dari kegiatan ini adalah Peningkatan rasio elektrifikasi di Sumatera Barat
3. Dinas Perkimtan
- Yang menjadi kegiatan strategis di Dinas Perkimtan adalah kegiatan terkait RTLH dan PSU baik dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh karena mempunyai daya ungkit untuk perekonomian masyarakat. Untuk kegiatan RTLH dan PSU ini adalah pikir dengan pagu Rp.103 Milyar
4. Dinas SDABK
- a. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sasak di Kab. Pasaman Barat dengan panjang 40 m dan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,-. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dan merupakan akses masyarakat Sasak Maligi.
 - b. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Bangis di Kab. Pasaman Barat dengan panjang 200 m dan pagu anggaran Rp. 4.893.620.500. Kegiatan ini merupakan kegiatan Strategis usulan Gubernur, Sekda serta permintaan masyarakat Air Bangis.
 - c. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Agam di Kab. Agam sepanjang 30 m dengan pagu anggaran Rp. 2.480.646.400,-. Kegiatan ini merupakan kegiatan Sungai Lintas Kab/Kota. Dimana sampah meluap pada saat

banjir dan sebagai akses masyarakat untuk jalan inspeksi sawah

- d. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batang Palangai di Kab.Pesisir Selatan sepanjang 275 m dengan pagu Rp. 4.564.163.100,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan luas irigasi sebesar 2.136 Ha dan butuh penanganan menyeluruh yang akan ditangani melalui anggaran DAK 2024.
 - e. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Batang Ibung Kota Padang sepanjang 300 m dengan pagu Rp. 1.500.000.000,-. Saat ini ada potensi Hibrid ada area perkampungan, sungai sering melimpah ke jalan provinsi dan pusat kegiatan masyarakat. Tahun 2023 BWS V telah melakukan pengerukan, akan tetapi belum mengatasi banjir yang terjadi
 - f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Bandar Gadang di Kab. Solok sepanjang 3.436,93 m dengan pagu Rp. 3.037.603.638,-. Kegiatan ini diyakini dapat memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat.
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Bintungan Kab. Solok sepanjang 1.419,7 m dengan pagu Rp. 3.290.394.438,- Kegiatan ini diyakini dapat memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat.
 - h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Bandar Sawah Padang Kab. Solok sepanjang 777,79 m dengan pagu Rp. 2.260.107.100,-. Kegiatan ini diyakini dapat memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat.
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Batang Selo di Kab.Tanah Datar sepanjang 934,32 m dengan pagu Rp.3.435.006.900,-. Kegiatan ini diyakini dapat memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat.
 - j. Rehabilitasi Bendung Irigasi Permukaan D.I Ladang Laweh Kab.Padang Pariaman sebanyak 1 Unit dengan pagu Rp. 2.625.973.474. Kegiatan ini diyakini dapat memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat.
5. Dinas BMCKTR
- a. Rehabilitasi Jalan Lubuk Sikaping Talu (P.096) DAU sepanjang 0,21 Km dengan pagu Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit Paket 1 sepanjang 2,52 Km dengan pagu Rp. 12.847.140.100
 - c. Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit Paket 2 sepanjang 0,786 Km dengan pagu Rp.10.000.000.000,-
 - d. Pembangunan Jalan Pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) paket I sepanjang 0,84 Km dengan pagu Rp. 9.536.882.313,-
 - e. Pembangunan Pada Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK dengan Panjang 1,42 Km dan pagu anggaran Rp. 13.091.800.000,-.
6. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional dengan pagu Rp. 4.144.896.365,-. Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (85000 Ton).
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan pagu Rp. 430.285.500.

- Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (1 dokumen).
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan pagu anggaran Rp. 4.431.188.807,-
 - d. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut dengan pagu Rp. 376.627.000,-
 - e. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi dengan pagu Rp. 193.098.000,-
 - f. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 1.173.247.500,-



2.4. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2024 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD

2024 dilakukan dengan alasan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah
 Berdasarkan capaian tahun 2023 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
 Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2024 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah
 Antara lain yakni capaian SILPA Tahun 2023 dan Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2024, selain itu juga terkait dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2024 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya adalah pengalokasikan DAU yang telah ditentukan penggunaannya serta adanya *mapping* sub kegiatan untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
 Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.
 Selian itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2024 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.
5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2024.

Pada APBD Tahun 2024, diproyeksikan SILPA Tahun 2023 yang dapat digunakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 251.444.175.049, namun berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar Rp. 180.447.544.425, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp. 70.996.630.624 mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2024 maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah penetapan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, maka untuk penganggaran yang bersumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja dan sumber dana melalui pergeseran anggaran berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. Bahwa adanya kejadian bencana alam di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat antara lain erupsi Gunung Merapi, bencana banjir, galodo dan longsor menjelang akhir tahun 2023 dan sampai kondisi bulan Juni 2024 yang menyebabkan beberapa infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir mengalami kerusakan yang berdampak kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan perekonomian masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
- c. Adanya penyesuaian anggaran sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF
- d. Terdapat penyesuaian penganggaran terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- e. Terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan pergeseran anggaran sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, serta Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, adanya ditemui saldo rekening minus, ketidaksesuaian anggaran kas, kekeliruan pemilihan spesifikasi barang, ketidaksesuaian pencantuman sumber dana dan permasalahan lain-lain yang menyebabkan adanya penyesuaian dan pergeseran rekening belanja
 Sehingga arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 seperti Silpa yang bersifat *earmark*.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan basca bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur.
6. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024

Adapun penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2024.
3. Pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

2.5. Penyampaian Usulan Daerah Untuk Pendanaan dari APBN

a. Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2025

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025, Kementerian PUPR menyelenggarakan Konsultasi Regional (Konreg) dengan tema “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan Konreg pada tanggal 14 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Desk per Provinsi. Dimana Provinsi Sumatera Barat dibahas pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: UM0102-Sj/218 tanggal 7 Maret 2024 perihal Undangan Pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan SKPD Provinsi Lingkup Bidang Infrastruktur PUPR dan Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat.

Konreg PUPR tahun 2024 ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, yang memberikan fokus pada penyiapan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, termasuk dalam penyusunan prioritasnya. Dari hasil pembahasan Desk Konreg PUPR 2024 disepakati hasil sebagai berikut:

Kegiatan Wajib / Lanjutan (F-KW)

No	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) / Pekerjaan	Lokasi	Sasaran		Anggaran (Rp. Ribu)
			Volume	Satuan	
Bidang Bina Marga					
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Air Gadang	Kota Padang	11,10	M	5.000.000
2	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Gasan Gadang B	Kota Pariaman	47,00	M	21.150.000
3	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Batang Babuai	Kab. Agam	11,80	M	3.163.745
4	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Subanak	Kab. Agam	6,80	M	3.057.782

5	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Pisau Hilang	Kab. Solok	10,60	M	7.013.151
6	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Lubuk Buaya A	Kota Padang	42,60	M	26.478.482
7	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Penggantian Jembatan / Penggantian Jembatan Sipapai B	Kab. Lima Puluh Kota	38,30	M	21.925.895
8	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Preservasi Rutin Jembatan / Preservasi Jembatan Khusus (Rutin) Sungai Dareh A	Kab. Dharmasraya	186,3	M	186.300
9	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Preservasi Rutin Jembatan / Preservasi Jembatan Khusus (Rutin) Kelok Ix 4	Kab. Lima Puluh Kota	453	M	453.000
10	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Preservasi Rutin Jembatan / Preservasi Jembatan Khusus (Rutin) Batang Timbulun	Kab. Solok Selatan	102,5	M	102.500

Bidang Cipta Karya

1	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan / Pembangunan Terintegrasi Rancang Bangun TPST Kota Padang	Kota Padang	100	KK	29.490.782
2	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan / Konsultan Manajemen Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Padang	Kota Padang	1	Laporan	932.874
3	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah / Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi / Pelaksanaan Penguatan Peran Aktif Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang	Kota Padang	1	Laporan	588.665
4	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Perluasan SPAM Kabupaten/Kota / Optimalisasi SPAM IKK V Koto Timur Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	50	SR	4.500.000
5	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Perluasan SPAM Kabupaten/Kota / Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Binaan, Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	50	SR	14.500.000
6	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Perluasan SPAM Kabupaten/Kota / Optimalisasi SPAM IKK Saniang Baka Kab. Solok 40 L/det	Kab. Solok	200	SR	11.200.000

Bidang Sumber Daya Air

1	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / OM Prasarana	Kota Padang	36	Unit	5.500.000
---	--	-------------	----	------	-----------

	Bidang SDA dan Irigasi / Tidak Ada RO / Embung/tampungan kecil lainnya yang dioperasikan dan dipelihara				
2	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana / Tidak Ada RO / Tanggap Darurat Bencana yang Difasilitasi	Kota Padang	2	Operasi	8.000.000
3	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat / Tidak Ada RO / Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi	Kota Padang	1	Kelompok Masyarakat	350.000
4	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Koordinasi / Tidak Ada RO / Fasilitas Kelembagaan	Kota Padang	5	Kegiatan	1.000.000
5	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana / Tidak Ada RO / Bangunan Pengendali Banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Kota Padang	6	Unit	2.800.000
6	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana / Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana / Tidak Ada RO / Alokasi Air yang Disusun	Kota Padang	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000
7	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi / Perencanaan dan Penganggaran / Tidak Ada RO / Penyusunan rencana, program, dan anggaran	Kota Padang	1	Layanan	300.000
8	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi / Perencanaan dan Penganggaran / Tidak Ada RO / Unit Desain BWS Sumatera V Padang	Kota Padang	1	Layanan	450.000
9	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi / Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan / Tidak Ada RO / Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kota Padang	1	Laporan	1.500.000
10	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi / Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan / Tidak Ada RO / Penyusunan laporan kinerja	Kota Padang	1	Laporan	100.000

Kegiatan Baru (F-KB)

No	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) / Pekerjaan	Lokasi	Sasaran		Anggaran (Rp. Ribu)
			Volume	Satuan	
Bidang Cipta Karya					
1	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung / Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan / Tidak Ada RO / Penataan Kelok 9	Kab. Lima Puluh Kota	33,3	Hektar	35.000.000
2	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan / Pembangunan TPA/TPST Tua Pejat	Kab. Kepulauan Mentawai	2.500,00	KK	20.000.000
3	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota / Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)- Padang	Kota Padang	100	Liter/detik	77.209.000

Bidang Perumahan					
1	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Bantuan PSU Bidang Perumahan / Pembangunan PSU Rumah Umum		870	Unit	8.577.633
2	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	1200	Unit	24.000.000
3	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi / Pembangunan Rusunawa Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat	Kota Padang	1	Tower	20.000.000
4	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan / [SBR-10261] Pembangunan Rumah Susun Tipe (Barak) sebanyak 12 Unit / 1 TB di Aie Pacah, Koto Tangah, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT	Kota Padang	12	Unit	21.840.000
5	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja / [SBR-11825] Pembangunan Rumah Susun Tipe (???) sebanyak 70 Unit / 1 TB di Kampung Jawa, Tanjung Harapan, KOTA SOLOK, SUMATERA BARAT	Kota Solok	44	Unit	42.000.000
Bidang Sumber Daya Air					
1	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai / Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Anai	KAB. PADANG PARIAMAN	500	M	10.000.000
2	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Prasarana pengaman pantai yang dibangun / Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Pokai	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	500	M	11.533.000

b. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)

Kegiatan Rakortekrenbang merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 dan Pasal 259. Dimana Kementerian atau lembaga pemerintah Nonkementerian berdasarkan pemataan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).

Kegiatan Rakortekrenbang tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d 7 Maret 2024. Dimana seluruh pemerintah Provinsi dijadwalkan untuk dilakukan pembahasan desk urusan dengan kementerian. Untuk Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan pada tanggal 5 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

No	Kementerian	Usulan	Target	Lokasi	Kesepakatan
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan SPAM IKK Singkarak	1	Kab. Solok	Tidak Direkomendasikan

2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perkuatan Tebing Batang Agam	12,6	Kota Payakumbuh	Direkomendasikan
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sikabalu	15	Kab. Kep. Mentawai	Direkomendasikan
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Pokai	2708	Kab. Kep. Mentawai	Direkomendasikan
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan tol Padang Pekanbaru	120	Prov. Sumbar	Direkomendasikan
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penataan Kelok 9	5	Kab. 50 Kota	Dibahas Lebih Lanjut
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sirilangai	1	Kab. Kep. Mentawai	Direkomendasikan
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan TPA/TPST Tua Pejat	5	Kab. Kep. Mentawai	Direkomendasikan
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan PLTS terpusat	1	Kab. Solok Selatan	Direkomendasikan
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah khusus nelayan	100	Kab. Pasaman Barat dan Kota Padang	Tidak Direkomendasikan
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Normalisasi dan perkuatan tebing sungai Btg Lembang	195	Kab. Solok	Direkomendasikan
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan Jalan Ruas Lubuk Lasiah - Surian (Jalan Kewenangan Nasional)	2	Kab. Solok	Direkomendasikan
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Anai	6,12	Kab. Padang Pariaman	Direkomendasikan

c. Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PU Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergi kebijakan antar K/L dan pemerintah provinsi untuk mendukung terpadunya pengembangan infrastruktur wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PU Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses pemrograman infrastruktur PU TA 2026.

Kegiatan ini bertujuan merumuskan kawasan prioritas dan rancangan program/kegiatan keterpaduan infrastruktur PU TA 2026 yang selaras dengan kebijakan/program K/L lain serta pemerintah provinsi. Rancangan program/kegiatan pembangunan infrastruktur PU TA 2026 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024), Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 serta selaras dengan Astacita dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 38 Provinsi.

Untuk kegiatan Rakorbangwil Tahun 2024, dilaksanakan tanggal 18 s.d 22 November 2024. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Desk dijadwalkan pada tanggal 21 November 2024 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Kawasan Prioritas Sumatera Barat

No	Kawasan	Kesepakatan	Catatan
1	KPPN Agam	Diakomodasi	1. Bappenas, Regional 1: Daerah 3T Mentawai sudah masuk di Ranwal RPJMN, Kepulauan Mentawai juga masuk sebagai salah satu fokus pengembangan kawasan pariwisata. KSPN Bukittinggi sebagai kawasan pariwisata juga sudah beririsan dengan Dataran Tinggi Minangkabau (Bukittinggi dsk), Kawasan Pertanian juga sudah beririsan dengan lokpri di Ranwal RPJMN yang salah satunya ada di Kab. Agam. Kawasan Perkotaan di RPJMN tidak hanya Kota Padang namun juga Perkotaan Bukittinggi dan Perkotaan Sawah Lunto.
2	Kawasan Perkotaan Palapa	Diakomodasi	2. Kemen PDT, Biroren: Kawasan 3T Mentawai merupakan kawasan tertinggal 2020-2024, namun berdasarkan Kepmen 490/2024 Kawasan Mentawai sudah tidak masuk sebagai kawasan tertinggal namun masih dalam tahap pembinaan. Terdapat 2 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Muara Takong - Kamang Baru (Kab, Sijunjung) dan Kawasan Lunang Silaut (Kab, Pesisir Selatan).
3	Daerah 3T Mentawai	Diakomodasi	3. Kemen Transmigrasi, Biroren: Komoditas utama di kawasan transmigrasi Kab, Sijunjung adalah sawit (30,5 ton/Ha). Komoditas utama di kawasan Lunang Silaut berupa perkebunan (5 ton/Ha) dan padi (3 ton/Ha). 4. Bappeda Prov. Sumbar: Tahun 2024 Mentawai sudah tidak masuk 3T, namun karena snggaran fiskal untuk Mentawai akan semakin berkurang sehingga masih memerlukan dukungan infrastruktur dari pusat. Untuk potensi pada kawasan transmigrasi Sijunjung dan Lunang Silaut berupa perkebunan sawit.
4	KSPN Bukittinggi	Diakomodasi	5. ATR/BPN, Tarunas: Kawasan Perkotaan Palapa masih sejalan dengan RTRW sebagai PKN. Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa) didorong sebagai Pusat Kegiatan Nasional; Pariaman, Sawahlunto, Muarasiberut, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Tuapejat didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah; P. Pagai Utara didorong sebagai PKS N Perbatasan Negara. 6. Kemen PDT, BPI: KPPN Agam masuk dalam prioritas perdesaan nasional 2020-2024, namun untuk 2025-2029 sudah tidak masuk dalam kawasan prioritas perdesaan nasional.

Program/kegiatan infrastruktur PU TA 2026 di Provinsi SUMATERA BARAT

No.	Kawasan	Program/Kegiatan	Unit Organisasi	Kesepakatan	Sumber Pendanaan	Catatan
1	KPPN Agam	Preservasi Jalan Bts Kota Payakumbuh - Baso	Ditjen Bina Marga	Diakomodasi	APBN	Preservasi
2	KSPN Bukittinggi	Preservasi Jalan Ruas SP. Aur Kuning - Sp. Taluk	Ditjen Bina Marga	Diakomodasi	APBN	Preservasi

3	Non Kawasan	Pembangunan TPST Regional Payakumbuh	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	<p>BPPW Sumbar: Belum menerima RC dari pemda; Lokasi baru; Lingkup pelayanan: Payakumbuh, Agam, Bukittinggi, dan Limapuluh Kota.</p> <p>Bappeda Prov. Sumbar: 2022 sudah menyusun FS penerapan pengelolaan sampah, terkait perubahan TPA Regional ke TPST, RC (FS, DED, AMDAL) akan disiapkan pada TA 2025. Penambahan lahan dari 14Ha menjadi 17 Ha (lokasi masih yang lama).</p> <p>DJCK: Lokasi sebaiknya jangan di lokasi yang sama karena merupakan lokasi patahan. RC sudah ada untuk kegiatan TPA</p>
4	Non Kawasan	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	Dibahas lebih lanjut di Konreg
5	Non Kawasan	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	Dibahas lebih lanjut di Konreg
6	Daerah 3T Mentawai	Pembangunan TPST Mentawai	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	Bappeda Prov. Sumbar: RC berupa FS TPST Mentawai akan diselesaikan oleh pemda mentawai pada tahun 2024. RC untuk TPA sudah selesai. Lahan sudah tersedia. RC TPST yang sudah tersedia (FS, DED) UPL/UKL selesai awal desember 2024
7	KPPN Agam	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	Dibahas lebih lanjut di Konreg
8	KSPN Bukittinggi	Pembangunan TPST Bukittinggi	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	<p>Bappeda Bukittinggi: Pengusulan TPST dengan ketersediaan lahan di Agam namun DED belum tersedia.</p> <p>Bappeda Prov. Sumbar: Pasca longsor Bukittinggi membuang</p>

						sampah ke Kota Padang. Dengan keterbatasan lahan, Bukittinggi membeli lahan untuk TPST di Kab. Agam untuk melayani kebutuhan layanan persampahan Kota Bukittinggi. DED akan disiapkan oleh pemda, lahan sudah tersedia. Pra FS TPST yang bekerjasama dengan German
9	KSPN Bukittinggi	Pembangunan SPAM Regional Agam-Bukittinggi	Ditjen Cipta Karya	Diakomodasi	APBN	BPPW: Dokumen RC akan disiapkan oleh Dit. Air Minum, DJCK. RC masih dalam proses legalisasi. Terdapat usulan baru untuk SPAM Regional Payakumbuh Kota Limapuluh RC sudah siap, dapat diprogramkan di TA 2026
10	Non Kawasan	Reviu Desain Pembangunan DI. Lubuk Buaya Kabupaten Pesisir Selatan	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	
11	Non Kawasan	Reviu Desain Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	
12	Non Kawasan	Reviu Desain Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Timpeh Kabupaten Dharmasraya	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	
13	Non Kawasan	Penyiapan Desain Pembangunan Air Baku Danau Diatas	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	DJSDA: Larap dan Dokling didorong TA 2026
14	Non Kawasan	Penyiapan Desain Rehabilitasi Bangunan Penyediaan Air Baku di	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	DJSDA: Pembangunan air baku masih belum ada DED, LARAP dan Dokling

		Kabupaten Solok Selatan				
15	Non Kawasan	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kab. Pasaman Barat	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	TA 2026 Pengadaan Lahan
16	KPPN Agam	Rehab Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Agam	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	Dibahas lebih lanjut di Konreg
17	KPPN Agam	Pengadaan Tanah untuk Revitalisasi Danau Maninjau	Ditjen Sumber Daya Air	Diakomodasi	APBN	DJSDA: Terkendala pembebasan lahan untuk revitalisasi Danau Maninjau. Pembebasan lahan 25 ha dari total 45 Ha yang harus dibebaskan. Pembebasan lahan dilakukan oleh satker tanah DJSDA. Harga 250.000-500.000/m ² TA 2024 sudah ada kegiatan penerapan sempadan dan bangunan penggali sedimen. Revitalisasi dapat dilakukan pada TA 2025 jika sempadan sudah ditetapkan. RC sudah DED dan Amdal TA 2026 dialokasikan 70 Miliar untuk pengerjaan pengerukan sedimen, cek dam, perkuatan tebing. (Bisa dilaksanakan jika pembebasan lahan selesai)

BAB III PERMASALAHAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan katalisator proses pembangunan daerah.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor.

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya :

1. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam pencapaian target RPJMD dan target Program Unggulan Kepala Daerah. Pengalokasian anggaran untuk Infrastruktur masih dinilai kurang, sehingga masih terdapat beberapa target pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang belum tercapai.
2. Masih terdapat usulan pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi semua Readiness Criteria yang ditetapkan.
3. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis Kawasan dari Pemerintah Pusat, belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan infrastruktur yang ada di daerah.
4. Usulan pembangunan Infrastruktur dari stakeholder terkait, belum sepenuhnya memperhatikan kewenangan daerah.
5. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang bersifat imperatif, menyebabkan daerah kurang memiliki keleluasaan dalam menetapkan indikator dan target pembangunan.
6. Kesulitan daerah dalam mendapatkan metadata untuk beberapa Indikator Utama Pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam penyusunan RPJPD.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Infrastruktur memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah sehingga dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh daerah;
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan komitmen dari semua pihak dan pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari unsur pemerintah daerah, namun juga non pemerintah dan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan;
- 3) Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional dan harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan pusat dan daerah, baik dari sisi fungsi, besaran, waktu, maupun lokasi;
- 4) Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketepaduan dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, penganggaran, proses konstruksi, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini juga perlu ditunjang oleh sistem informasi baik dari sisi proses pengusulan data secara numerik maupun dari segi sistem informasi geografis untuk mengakomodir kebijakan satu peta.

4.2 Saran

- 1) Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antara rencana percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi tetangga, dan rencana pembangunan sektoral lainnya;
- 2) Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatera Barat harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, misalnya tingginya volume perjalanan orang dan barang yang akan menjadi demand yang potensial untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Peluang lainnya terkait infrastruktur bertaraf internasional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat seperti pelabuhan dan bandara yang berpotensi untuk mendatangkan investor.
- 3) Perlu peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi dari semua stakeholders untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dicari alternatif pembiayaan selain APBD provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur.